

TESIS

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, UKURAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DIMODERASI TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH

***THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE, REGIONAL SIZE
AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON LOCAL GOVERNMENT
PERFORMANCE MODERATED BY TRANSPARENCY***

disusun dan diajukan oleh

**SUKARMAN
A062201008**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, UKURAN DAERAH
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DIMODERASI TRANSPARANSI
PEMERINTAH DAERAH**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE, REGIONAL SIZE
AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON LOCAL GOVERNMENT
PERFORMANCE MODERATED BY TRANSPARENCY***

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Akuntansi

Disusun dan diajukan oleh

**SUKARMAN
A062201008**

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, UKURAN DAERAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DIMODERASI TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH**

Disusun dan diajukan oleh

**SUKARMAN
A062201008**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., AK., CA.

NIP 196503051992032001

Dr. Darwis Said, S.E., AK., M.SA., CA.

NIP 196608221994031009

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.

NIP. 196811251994122002



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.

NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Sukarman

NIM : A062201008

jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, UKURAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DIMODERASI TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Sukarman

PRAKATA

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA., CA. sebagai pembimbing II. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta saya ucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada isteri tercinta dan seluruh keluarga atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis, Januari 2024

Sukarman



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

SUKARMAN. *Pengaruh Belanja Pemerintah, Ukuran Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Dimoderasi Transparansi Pemerintah Daerah* (dibimbing oleh **Kartini** dan **Darwis Said**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh belanja pemerintah, ukuran daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit dengan Tahun pengamatan 2017 hingga 2021. Jenis sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana populasi sebagai sampel sehingga sampel yang dapat diolah sebanyak 120 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *website* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) ver. 27. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (2) ukuran daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) transparansi mampu memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. (5) transparansi tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. (6) Transparansi tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Povinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci : belanja pemerintah, ukuran daerah, sistem pengendalian internal, transparansi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

SUKARMAN. *The Effect of Government Expenditure, Regional Size and Internal Control System on Local Government Performance Moderated by Transparency* (supervised by Kartini and Darwis Said).

This study aims to determine and explain the effect of government spending, regional size and internal control systems on local government performance moderated by transparency. The population in this study were 24 regencies / cities in South Sulawesi Province with observation years 2017 to 2021. The type of sample using a saturated sample where the population as a sample so that the sample that can be processed is 120 samples. The data used in this study used secondary data derived from the website of the Ministry of Finance, Directorate General of Fiscal Balance and the Indonesian Supreme Audit Agency. The data was then analyzed using the Statistical Program for the Social Sciences (SPSS) ver. 27. Data collection using technical documentation, namely data collection in the form of documents that have to do with the data needed with the analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that. First, government spending has a negative and significant effect on local government performance. Second, regional size has a significant negative effect on local government performance. Third, the internal control system has no effect on local government performance. Fourth, transparency is able to moderate the effect of regional spending on local government performance. Fifth, transparency is unable to moderate the effect of regional size on local government performance. Sixth, transparency is unable to moderate the effect of the internal control system on the performance of local government districts / cities in South Sulawesi Province.

Keywords: Government Expenditure, Regional Size, Internal Control System, Transparency.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep.....	19
2.1.1 Teori Organisasi	19
2.1.2 <i>Institutional Theory</i> (Teori Institusional).....	20
2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah	22
2.1.4 Belanja Pemerintah Daerah	26
2.1.5 Ukuran Daerah	27
2.1.6 Sistem Pengendalian Internal	28
2.1.7 Transparansi.....	29
2.2 Tinjauan Empiris.....	32
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	40
3.1 Kerangka Pemikiran	40
3.2 Hipotesis Penelitian	42
3.2.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	42
3.2.2. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	44
3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	45
3.2.4 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dimoderasi Transparansi.	47
3.2.5 Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Dimoderasi Transparansi	49
3.2.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Dimoderasi Transparansi.....	50
BAB IV METODE PENELITIAN.....	53
1 Rancangan Penelitian	53
2 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	54
4 Jenis dan Sumber Data.....	56
5 Metode Pengumpulan Data.....	56
6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	56



4.6.1	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	57
4.6.2	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	58
4.6.3	Variabel Pemoderasi (Z).....	58
4.6.4	Definisi Operasional	59
4.7	Teknik Analisis Data	60
4.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	60
4.7.2	Uji Asumsi Klasik	60
4.7.3	Uji Hipotesis.....	63
4.8	<i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA).....	64
BAB V HASIL PENELITIAN		65
5.1	Deskripsi Data	65
5.1.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	65
5.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	68
5.3	Uji Regresi	72
5.4	Uji <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA).....	73
BAB VI PEMNAHASAN		75
6.1	Belanja Pemerintah Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	76
6.2	Ukuran Daerah Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	77
6.3	Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan....	78
6.4	Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Dimoderasi Transparansi	79
6.5	Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Dimoderasi Transparansi.....	80
6.6	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Dimoderasi Transparansi	80
BAB VII PENUTUP		82
7.1	Kesimpulan	82
7.2	Implikasi.....	84
7.3	Keterbatasan Penelitian	84
7.4	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN		93



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1	Ketertanggung Fiskal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 6
1.2	Rata-Rata Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kab/Kota Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 9
1.3	Persentase Rata-Rata Total Aset Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 10
1.4	Total Perkembangan Temuan Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Kab/Kota Tahun 2017-2021 13



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Rasio Ketergantungan	25
2.2	Rasio Efisiensi	27
4.1	Populasi dan Sampel	55
4.2	Operasional Variabel	59
5.1	Analisis Deskriptif.....	66
5.2	Uji Normalitas.....	68
5.3	Uji Multikolinearitas	69
5.4	Uji Autokorelasi	70
5.5	Uji Heterokedastisitas	71
5.6	Uji Koefisien Determinasi.....	72
5.7	Uji Hipotesis Sebelum Moderasi.....	72
5.8	Uji <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA)	73
6.1	Ringkasan Hasil Penelitian	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah dijalankan sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur segala urusan dalam daerah tersebut. Untuk lebih menyempurnakan penerapan otonomi daerah tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian otonomi yang luas kepada masing-masing daerah, membuka jalan bagi pemerintah yang ada di daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat luas. Penerapan otonomi daerah pada masa reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

akan bahwa pendelegasian kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mendayagunakan potensi keuangan daerah



sendiri dan melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat ke daerah dan antar daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pimpinan unit organisasi Kementerian dan Lembaga bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan juga menjadi mekanisme utama dalam menciptakan akuntabilitas publik (Rutherford, 2000). Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal

kan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada



anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Patriati & Ratri, 2010). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah selain dapat dilihat dari aspek kinerja non keuangan namun juga dapat dilihat melalui aspek keuangan. Gambaran kinerja keuangan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi wujud akuntabilitas publik atas pelaksanaan APBD menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk membuat keputusan dan menilai kinerja organisasi (Halim, 2007). Kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor utama diantaranya, penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara-lain: faktor keuangan dan faktor lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2016) menggunakan variabel

keuangan dari laporan keuangan daerah yang diwakili oleh *revenue, expenditure, interest, tax, real estate, grant, capital, GDP (Gross Domestic Product)*,



sebagai faktor keuangan dan *employment* sebagai faktor lingkungan. Patrick (2007) telah meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Ia meneliti tentang komponen organisasi yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi inovasi administratif. Variabel yang digunakan untuk memproksikan karakteristik daerah terdiri dari, ukuran daerah, *functional differentiation*, umur daerah dan *intergovernmental revenue*. Penelitian yang dilakukan Djoko Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggunakan variabel ukuran daerah (*size*), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Status Daerah untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah. Penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menggunakan ukuran daerah (*size*), tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitriasaki (2012) juga menggunakan variabel temuan audit sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim, 2002). Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut terutama sumber daya keuangan secara optimal yang dapat di

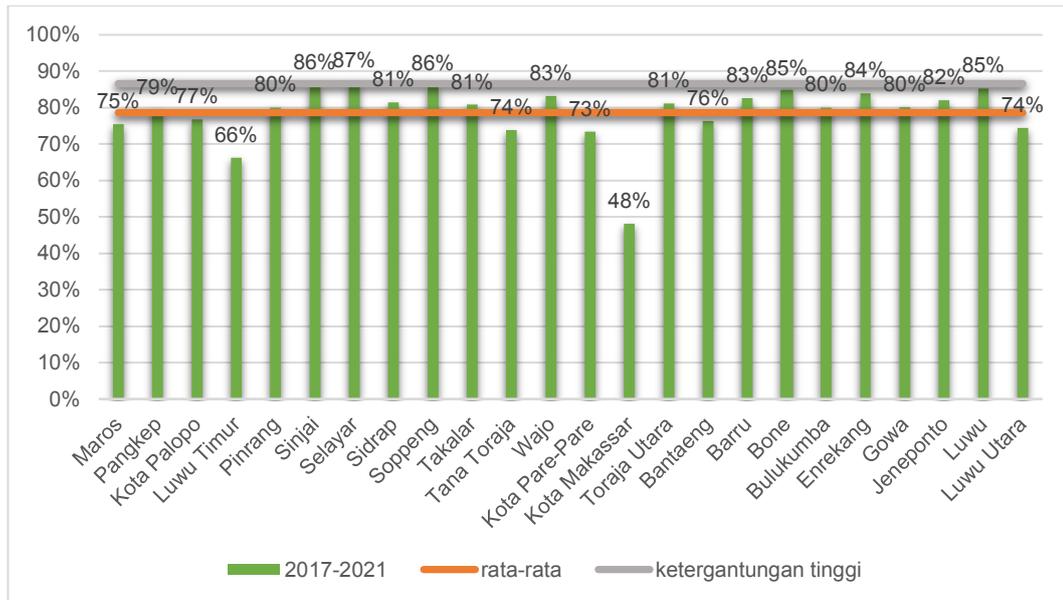
h satunya dengan mengukur kinerja keuangan daerah itu sendiri.



Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari ukuran analisis rasio keuangan pemerintah daerah. diantaranya yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan. Namun dalam penelitian ini digunakan rasio ketergantungan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan di daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat terbatas, ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87% (Olivia, 2018). Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2014). Namun, hingga saat ini masih banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sehingga belum mampu mandiri dari segi keuangan.

Gambar 1.1 adalah data ketergantungan fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.





Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1. 1 Ketergantungan Fiskal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir rata-rata ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 79%. Daerah dengan rata-rata ketergantungan fiskal tertinggi yaitu Kabupaten Selayar dengan ketergantungan fiskal 87%. Rata-rata ketergantungan fiskal yang terendah yaitu Kota Makassar yaitu sebesar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hanya satu kota yaitu Makassar yang memiliki ketergantungan fiskal rendah atau bisa dikatakan telah memiliki kemandirian dalam hal keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari desentralisasi yaitu agar daerah dapat mandiri sesungguhnya belum tercapai dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Jika suatu daerah masih belum mandiri dalam



iliki ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat diharapkan mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien agar menambah jumlah

pendapatan daerah salah satunya dengan mengalokasikan dana untuk belanja modal.

Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian terdahulu maka dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu belanja daerah, temuan atas sistem pengendalian internal, dan *size* dengan transparansi sebagai pemoderasi. Faktor pertama yaitu belanja daerah. Anggaran daerah yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah dan disusun berpedoman pada Visi dan Misi serta rencana kerja pemerintah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD.

Secara garis besar APBD terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan). Sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang merupakan sumber daya keuangan yang akan digunakan dalam menjalankan program/kegiatan, sedangkan pengeluaran daerah berupa belanja dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan input yang n untuk menjalankan program/kegiatan. Untuk dapat menjalankan kegiatan yang disusun dalam APBD guna mencapai tujuan yang ingin

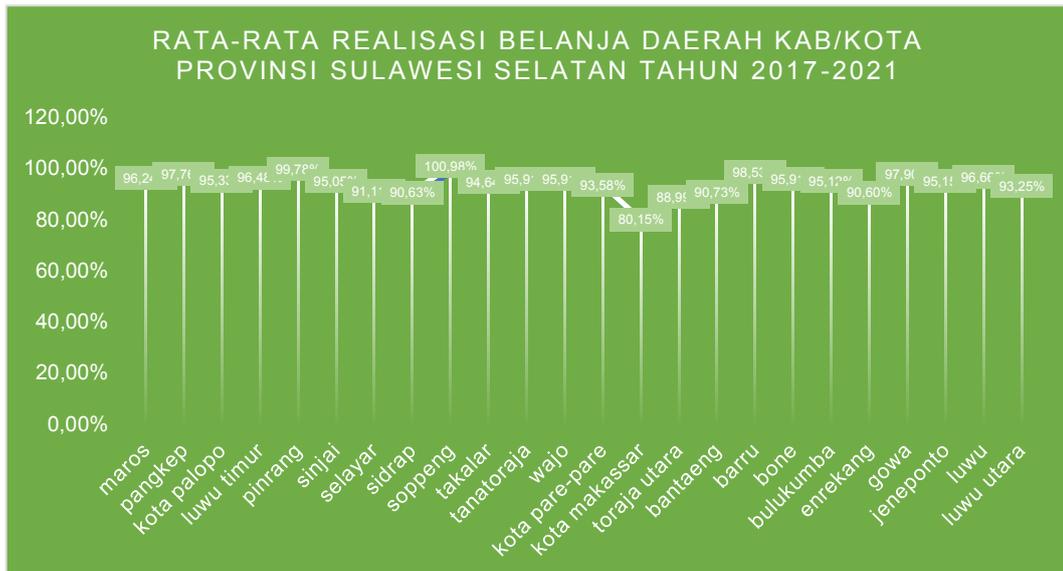


dicapai, Pemda bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber terbesar penerimaan berasal dari pendapatan yang dikategorikan dalam tiga golongan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan Pemda, maka Pemda wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan di audit oleh institusi pemeriksa yang bebas dan mandiri, dalam hal ini adalah BPK RI. Selain Laporan Keuangan yang menggambarkan akuntabilitas keuangan, dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Pemda, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (akuntabilitas kinerja).

Demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan total realisasi belanja pemerintah yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan produktifitas suatu daerah misalnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah menyediakan belanja daerah di sektor infrastruktur. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan.





Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1. 2 Rata-Rata Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kab/Kota Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

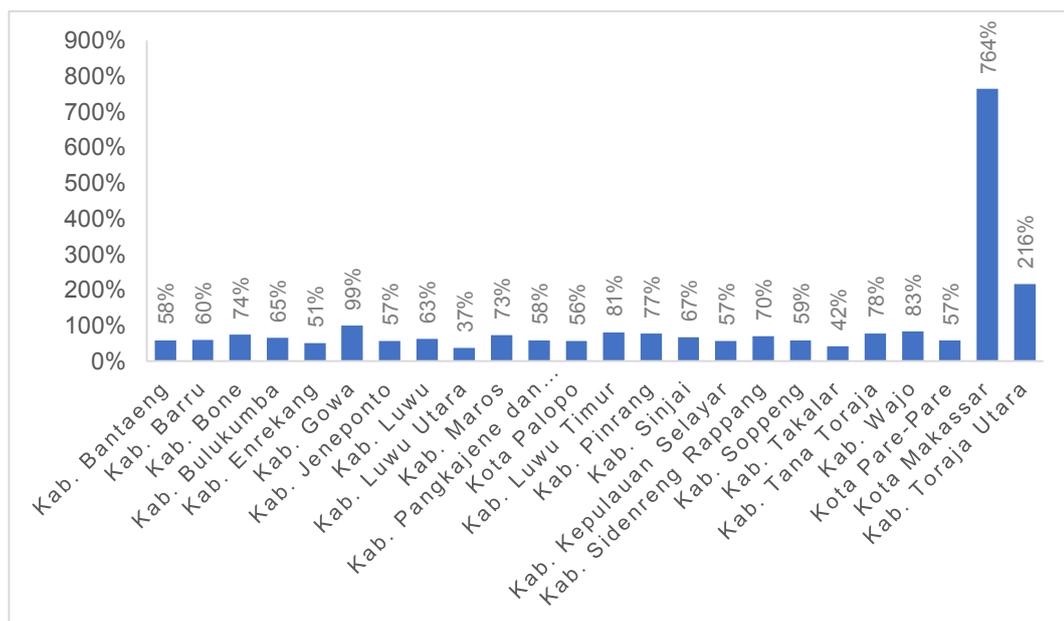
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah pemerintah di provinsi masih belum efektif. Ada beberapa daerah yang rata-rata belanja daerahnya belum mampu mencapai target realisasi atau ada juga daerah yang melebihi target yang ditetapkan.

Penelitian menurut Mustikarini dan Fitriasari (2012) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun anggaran 2017. Hasil penelitian belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel penelitian ini dilakukan pada seluruh 275 Pemda Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data *cross section* dengan LPPD dan LKPD yang telah diaudit. Kinerja pemda dipengaruhi ukuran (*size*) daerah ditemukan sejumlah peneliti, antara lain Hendro Sumarjo (2010) serta Kusumawardani (2012). Hal ini



dengan Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Oleh karena itu, sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat. Hendro Sumarjo (2010) pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan kinerja pemerintah juga ikut meningkat.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1. 3 Persentase Rata-Rata Total Aset Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2021

Berdasarkan data di atas dari total 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada 2 daerah yang memiliki *size* diatas 100% sedangkan hanya ada 1 daerah yang memiliki aset hampir 100% yaitu 99%. Sehingga dapat dikatakan bahwa *size* daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah seharusnya mampu memaksimalkan aset yang ada dengan menunjukkan kinerja yang lebih



ngga pemerintah daerah bisa menambah lagi total aset daerahnya.

berapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kusumawardani

menunjukkan bahwa *size* pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2016) serta Masdiantini dkk. (2016) Artinya ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani dkk. (2017) menemukan hasil bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran pemerintah akan membuat tugas operasional pemerintah daerah menjadi lebih mudah, hal tersebut akan membuat lebih mudah pula untuk memberikan layanan masyarakat yang cukup. Selain itu, kemudahan dalam pengoperasian akan membuat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan daerah sebagai bukti kinerja yang lebih baik menjadi lebih mudah. Namun, karena ukuran yang besar akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan yang besar pula, pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas dengan ukuran yang besar. Sementara itu, perbaikan kinerja keuangan pemerintah dapat digunakan untuk secara tidak langsung menargetkan akuntabilitas. Jika rakyat telah mengalami sendiri kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah atas hasil kinerja pemerintah, niscaya mereka tidak akan menuntut akuntabilitas yang sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hendro Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah semakin besar tuntutan masyarakat dalam kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik seiring dengan *size* pemerintahan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa *size* dapat mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu semakin besar *size* maka semakin besar juga kinerja suatu entitas atau sebaliknya.



Hal selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sistem Pengendalian Internal (SPI). Menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai.

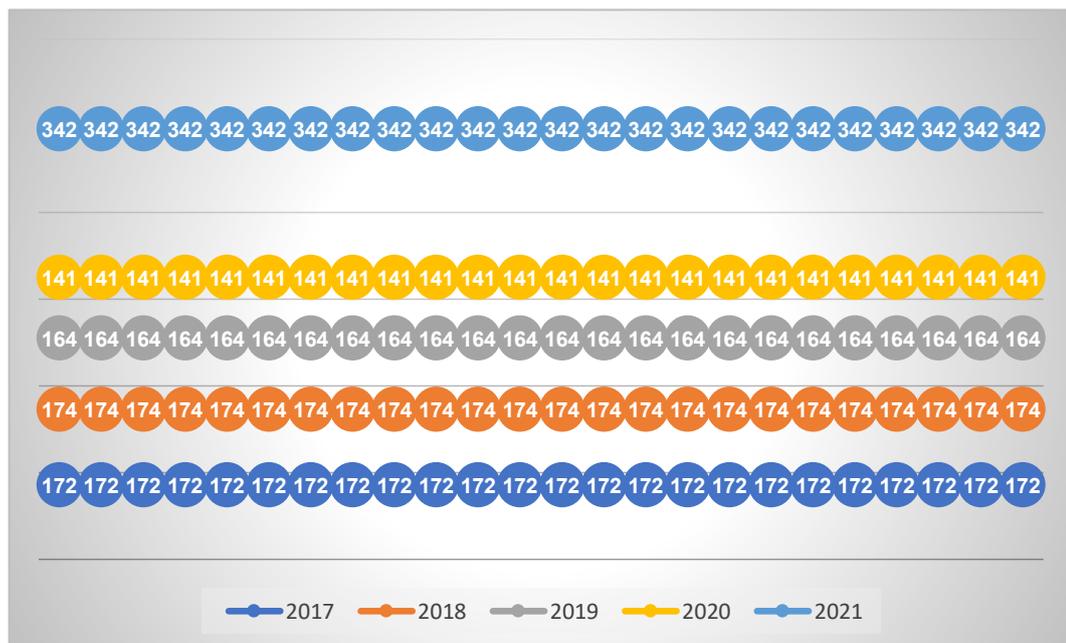
Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban orang adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan untuk produksi kinerja di instansi pemerintah. Langkah-langkah ini harus diselesaikan secara terorganisir, teregulasi, efektif, dan efisien. Untuk melakukan ini, pemerintah memerlukan sistem yang dapat memberikan jaminan yang cukup kepada warga negara bahwa tindakan telah diambil sesuai dengan arah yang dimaksudkan dan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Sistem tersebut disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Noviyana & Pratolo, 2018). Hal tersebut sejalan dengan Mokoginta dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dengan demikian, pengendalian intern dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat Aziz dkk. (2018) serta Mattoasi dkk. (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di



di Gorontalo. Penelitian tentang pengaruh SPIP pernah diteliti oleh
dkk. (2018) serta Aziz dkk. (2018) yang menyatakan bahwa SPIP

berpengaruh positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah akan tetapi menurut Mokoginta dkk. (2017) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah.

Gambar 1.4 adalah data perkembangan jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah kab/kota di provinsi Sulawesi selatan.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1. 4 Total Perkembangan Temuan Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Kab/Kota Tahun 2017-2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Selain faktor-faktor internal penelitian ini juga menggunakan hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai faktor eksternal.

Menurut Noviyanti dan Kiswanto (2016) Kinerja keuangan Laporan Keuangan Daerah (LKPD). LKPD harus diaudit oleh BPK untuk menguji n dari laporan keuangan tersebut. Hal itu berguna untuk mencegah LKPD agai jenis tidak kecurangan pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintahan.



Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan harapan memberi dampak positif bagi kepentingan publik dalam menciptakan strategi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004). Selain itu lahirnya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hefrizal Handra, S. M 2009). Di mata masyarakat kinerja pemerintah selalu menjadi suatu perhatian besar dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan suatu program kerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk memaksimalkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja pemerintah tidak dapat dilakukan berdasarkan besar/kecilnya laba/keuntungan yang diperoleh, karena pemerintah bukan entitas bisnis yang menilai kinerja berdasarkan laba. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.



asil pemeriksaan keuangan oleh BPK dapat berupa temuan audit, opini
upun kesimpulan audit. opini laporan keuangan pemerintah daerah dari

tahun 2008-2012 menunjukkan belum banyaknya pemerintah daerah (khususnya kabupaten dan kota) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan masih banyaknya pemerintah daerah yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) oleh BPK (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dengan memberikan data-data keuangan yang memadai serta keleluasaan BPK dalam mengaudit laporan keuangannya.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* transparansi adalah salah satu pilar yang harus diwujudkan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan karakteristik-karakteristik seperti *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, effectiveness and accountability*. Upaya dalam meningkatkan transparansi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Terkait pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan *content menu* TPAD dalam *website* resmi pemerintah daerah beserta dokumen-dokumen apa saja yang harus disediakan di dalamnya.



penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum Novita (2017) mengungkapkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di

Bali, NTB dan NTT masih tergolong sangat rendah tidak cukup (*Insufficient*). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Syamsul dan RitongaTaufiq (2017) mengatakan bahwa indeks transparansi dapat mendorong tata kelola pemerintah daerah, selain itu transparansi juga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi *stakeholder* untuk mengambil keputusan yang efektif. Oleh karena itu tata Kelola pemerintahan yang baik akan menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah, ukuran daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah dimoderasi transparansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang , maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Ukuran Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?



5. Apakah temuan kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah dimoderasi transparansi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian



asil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu:

1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi peneliti secara pribadi maupun bagi peneliti lain dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah pada Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kontribusi Teoretis

Temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada kemajuan akuntansi sektor publik dalam sains, khususnya di bidang akuntansi pemerintah, dan berfungsi sebagai sumber daya untuk penelitian di masa depan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

Tinjauan teori adalah penegasan landasan teori yang dipilih peneliti dalam penelitiannya, serta definisi yang disusun secara sistematis yang mendukung dan menjelaskan variabel penelitian. Landasan teori sangat penting karena menjadi landasan yang kuat dalam menjelaskan fenomena penelitian. Adapun teori yang mendasari penelitian ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

2.1.1 Teori Organisasi

Menurut McAuley dkk. (2007) teori organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengkoordinasi orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya McAuley dkk. (2007) menyatakan teori organisasi adalah suatu studi tentang struktur, fungsi dan kinerja organisasi dan perilaku orang-orang dan kelompok yang berada di dalamnya. Teori ini juga mempelajari bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana seharusnya organisasi diatur. Salah satu metode organisasi yang baru untuk manajemen terkait dengan orang-orang dalam perusahaan maupun luar perusahaan disebut inovasi organisasi (Camison dkk. 2014). Definisi inovasi organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Beberapa penelitian menyatakan bahwa inovasi organisasi merupakan inovasi administrasi (Damanpour & Evan, 1984). Jensen (1983) menjelaskan akuntansi merupakan bagian integral dari struktur tiap-tiap organisasi, sehingga perkembangan teori organisasi akan berhubungan dengan perkembangan teori akuntansi. Hal ini juga menjelaskan bahwa setiap organisasi



milih sistem dan praktik akuntansi yang dijalankan sesuai dengan praktik organisasi yang dijalankan. Pemerintah merupakan organisasi yang

berkewajiban menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Adopsi dan pemilihan kebijakan akuntansi dapat didefinisikan sebagai inovasi administrasi (Patrick, 2007). Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan inovasi administrasi. Inovasi administrasi melibatkan struktur formal organisasi dan proses administrasi (Damanpour dan Evan, 1984). (Damanpour & Fariborz, 1991)

Berdasarkan pengertian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi memiliki fungsi untuk menjelaskan kegiatan serta dinamika kerjasama pada sebuah organisasi serta memberikan tuntunan maupun pedoman dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prediksi yang dilakukan akibat pengambilan keputusan tersebut.

2.1.2 *Institutional Theory* (Teori Institusional)

Institutional theory memiliki asumsi dasar bahwa individu atau organisasi akan cenderung menyamakan bentuk dengan lingkungan dalam rangka memperoleh legitimasi. Isomorphism menurut DiMaggio dan Powell (1983) dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu *competitive* isomorphism dan *institutional* isomorphism. *Competitive* Isomorphism lebih menekankan kepada usaha untuk menyamakan bentuk organisasi terkait kompetisi pasar dan biasanya relevan pada konteks kompetisi bebas dan terbuka. *Institutional Isomorphism* memandang bahwa organisasi tidak hanya bersaing untuk memperoleh sumberdaya atau pelanggan, tetapi juga untuk memperoleh *political power* dan *institutional legitimacy*. Kemudian DiMaggio dan Powell (1983) memperkenalkan tiga mekanisme *institutional* isomorphism yaitu *Coercive* Isomorphism, adalah



ism yang terjadi karena adanya tekanan formal maupun informal pada organisasi yang berasal dari organisasi lain yang berhubungan dan budaya

dari masyarakat tempat organisasi berada. Mekanisme isomorphism ini lebih kepada pengaruh politis dan masalah legitimasi. *Mimetic* Isomorphism, adalah respon standar yang diberikan organisasi atas adanya ketidakpastian, karena adanya ketidakpastian, organisasi akan melakukan imitasi dan memodelkan organisasinya dengan organisasi lain yang mampu menghadapi ketidakpastian tersebut. *Normative* Isomorphism, adalah isomorphism yang berkaitan dengan profesionalisasi. Mekanisme ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan oleh pihak yang memiliki otoritas. Lebih lanjut, DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa tindakan organisasi didorong oleh justifikasi sosial, yaitu keinginan pelaku organisasi untuk memperoleh apresiasi dan pengakuan atas tindakan yang mereka lakukan. Dari perspektif ini, kegiatan strategis didefinisikan sebagai hal sosial dan normatif karena motif tindakan berasal dari kecenderungan aktor untuk memperoleh legitimasi atas kegiatan tersebut, dan efektivitas tindakan ini dinilai oleh banyak konstituen seperti pemegang saham, pelanggan, pemerintah, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang menilai kesesuaian atau legitimasi kegiatan strategis dari sudut pandang mereka sendiri.

Institutional Theory juga menunjukkan bahwa lingkungan institusional misalnya, pemerintah, masyarakat, dan kelompok masyarakat membebankan tekanan yang signifikan terhadap organisasi untuk membenarkan tindakan strategis yang mereka lakukan dan *output* dari tindakan tersebut, tekanan ini kemudian memotivasi organisasi untuk meningkatkan legitimasi mereka terkait dengan konstituen dan agar organisasi dapat sesuai dengan aturan-aturan kelembagaan, regulasi, norma, dan ekspektasi yang ada (Dacin, 1997).

Institutional theory menyebutkan bahwa perusahaan dalam lingkungan cenderung terstruktur dan serupa dengan perusahaan yang telah mapan, sebagian besar perusahaan yang berada dalam lingkungan yang sama,



cenderung memiliki karakteristik yang serupa (DiMaggio & Powell, 1983). Deegan (2009) lebih lanjut menyebutkan bahwa perusahaan yang menyimpang dari norma yang dilembagakan mungkin memiliki masalah dalam mencapai dan mempertahankan legitimasi. Selain itu, riset terdahulu berpendapat bahwa perusahaan harus mengikuti norma institusional untuk memperoleh dan mempertahankan status legitimasi. Pendapat ini dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang telah dilembagakan.

Institusional theory membantu pemahaman kita tentang adanya tekanan agar institusi menjadi lebih mirip, yang menurunkan keragaman institusional. Organisasi pada umumnya akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar yang mudah dikenali dan diterima dalam bidang organisasi, untuk membantu mendorong legitimasi suatu organisasi. Teori institusional menjelaskan bagaimana pilihan yang disengaja dan tidak disengaja mengarahkan institusi untuk mencerminkan norma, nilai, dan ideologi organisasi. Akibatnya, organisasi yang memenuhi karakteristik lingkungan yang diharapkan, menerima legitimasi dan terbukti layak atas sumber daya oleh masyarakat dan lingkungan yang lebih.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran

sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja daerah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah



berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Mahsun dkk. (2006) menyatakan bahwa pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain. Kelompok Masukan (*Input*), Kelompok Proses (*Process*), Kelompok Keluaran (*Output*), Kelompok Hasil (*Outcome*), Kelompok Manfaat (*Benefit*), Kelompok Dampak (*Impact*). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Mahmudi (2019) mengevaluasi efisiensi pelayanan sebagai alat ukur kemampuan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil perolehan dari inisiatif yang telah atau belum dilaksanakan sehubungan dengan pemanfaatan dana daerah. Sudaryo dkk. (2017:8) Kinerja keuangan adalah suatu

nerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan sarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan



berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Auditya dkk. (2013) mengemukakan inerja pemerintah daerah memberikan ringkasan sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tujuan atau sasarnya serta penjelasan tentang visi, misi, dan strateginya. Hal ini juga menunjukkan seberapa baik atau buruknya kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan indikator akuntabilitas dan transparansi (Asmawati dkk. 2018).

Mulyani dkk. (2017:60) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian aktivitas pada bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan perundang-undangan selama periode anggaran. Patarai (2016) kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara. Dari sistem Negara Kesatuan yang dianut melahirkan “daerah” dan dengan sendirinya terdapat hirarki “pusat-daerah” Konsekuensi demikian menempatkan daerah bukan sebagai entitas tunggal, melainkan terintegrasi secara horizontal-vertikal.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Siregar dkk. (2020:3) Sehubungan dengan tujuan organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja keuangan harus ada dalam pengukuran pengukuran kinerja pemerintah daerah.



asio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proporsi alisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi

Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Pendapatan Transfer merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat jenis transfer pemerintah pusat kepada daerah yaitu, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah mengindikasikan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018). Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (DJPK, 2014). Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan formulasi.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Skala interval dari Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
0 – 25	Sangat Rendah
25- 50	Rendah
50 - 75	Sedang
75 - 100	Tinggi

Sumber: UGM (1991)



2.1.4 Belanja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Skor kinerja pemerintah daerah akan terpengaruh ketika belanja daerah meningkat seiring dengan pelayanan masyarakat.

Belanja daerah akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Maka, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk melaporkan belanja yang telah dikeluarkan. Penelitian



akukan oleh Simanullang (2013) menunjukkan belanja daerah tidak terpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun Okfitasari (2015) serta

Mustikarini dan Fitriasaki (2012) mengatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan semakin baik dan berkualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan semakin tinggi tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah melakukan pertanggungjawaban belanja daerah yang hemat, efektif, efisien, adil dan merata.

Untuk tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Teknis analisis data yang digunakan untuk melihat efisiensi belanja daerah merujuk pada (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi (%)	Persentase efisiensi
>100	Tidak efisien
100	Efisiensi Berimbang
<100	Efisien

Sumber: Mahsun (2012:187)

2.1.5 Ukuran Daerah

Ukuran (size) pemerintah daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Ukuran (size) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi Djoko Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Martani dan Zaelani (2011) serta Sumarjo (2010) ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan Logaritma natural (Ln) dari total aset seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012). Hal ini



kan besarnya total aset masing-masing Pemda berbeda bahkan
yai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim.
menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset

perlu di LN. Maka salah satu cara untuk mengukur seberapa mudah suatu daerah melakukan kegiatan operasional adalah dengan membandingkan besar kecilnya pemerintahan dengan total aset yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar pemerintahan, semakin mudah bagi daerah untuk melakukan kegiatan operasional dan memutar roda pemerintahan. Besarnya ukuran pemerintah daerah memudahkan kelancaran proses perolehan pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan kinerja yang lebih baik akan dicapai oleh pemerintah daerah yang lebih besar dengan pengelolaan yang optimal.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal (SPI) menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 merupakan korespondensi siklus administrasi yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai hasil pelaksanaan yang menggambarkan kehandalan detail elemen publik, konsistensi dengan pedoman, dan kerangka pengendalian internal yang mencerminkan kemampuan dan kelangsungan hidup. PP No. 66 Tahun 2008 harus menjadi pedoman bagi rancangan SPI Pemerintah Daerah. Berlakukannya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pendukungnya maka Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dibidang pemerintahan masing-masing. Pengertian SPIP sesuai dengan PP Nomor. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk



kan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap entitas dalam pelaporan akuntansi keuangan negara wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja.

2.1.7 Transparansi

D. Sari, (2013) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domainnya yaitu negara, sektor privat dan masyarakat. World Bank (1994) merumuskan empat elemen *good governance* yang terdiri dari manajemen sektor publik, akuntabilitas, kerangka hukum untuk pembangunan serta transparansi dan informasi. Di sisi lain Asian Development Bank (1999) menggambarkan *good governance* dalam empat elemen juga yaitu akuntabilitas, partisipasi, dapat diprediksi dan transparansi. Werimon dkk. (2007) mengartikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jo dan Kim (2007) berargumen bahwa frekuensi pengungkapan informasi pada periode yang lebih banyak dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Sebagai salah satu aspek dari *e-government*, *website* yang berbasis internet kemudian menjadi salah satu bentuk portal informasi untuk mewujudkan transparansi dan memberikan pelayanan publik. Styles dan Tennyson (2007) mengungkapkan bahwa internet merupakan sarana yang paling mudah dan murah bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi, termasuk informasi tentang laporan keuangannya.



da penelitian ini penilaian tingkat transparansi pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh Huwae dan

Ritonga (2016) yaitu dengan melihat penyajian 29 indikator dalam *website* resmi pemerintah daerah. dalam indikator tersebut terdapat terdapat informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBD. Untuk tahap perencanaan terdapat 10 indikator yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja Anggaran SKPD dan PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, serta ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan PPKD.

Pada tahap pelaksanaan terdapat sembilan indikator yang meliputi informasi Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi Pembiayaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, dan SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban digunakan 10 indikator untuk penilaian tahun yaitu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan empat kriteria ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan informasi, dan pengungkapan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan



berarti informasi pengelolaan keuangan daerah yang diukur tersedia atau disajikan dalam *website* resmi pemerintah daerah. Aksesibilitas menunjukkan informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersedia dalam *website* resmi pemerintah daerah dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat.

Ketepatan waktu dinilai berdasarkan perbandingan tanggal unggah pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah dengan tanggal penetapan sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan (Syamsul & Ritonga Taufiq, 2017). Dalam penelitian ini, rentang waktu yang dipersyaratkan adalah 30 hari setelah dokumen pengelolaan keuangan daerah ditetapkan.

Pengukuran kelengkapan kriteria transparansi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan untuk memperoleh indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dengan cara sebagai berikut.

1. Pengukuran menggunakan skor dikotomi. Jika item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu, diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria. Jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu, diberi nilai 0. Untuk kriteria frekuensi pengungkapan apabila item tidak tersedia akan diberi nilai 0, apabila item tersedia dalam satu tahun akan diberi nilai sepertiga, item tersedia dalam dua tahun akan diberi nilai dua per tiga sedangkan apabila item tersedia dalam tiga tahun berturut-turut akan diberi nilai 1.
2. Skor yang diperoleh untuk masing- masing kriteria dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria yaitu 0,25.
3. Skor yang diperoleh setiap indikator selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah.



4. Indeks transparansi dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.

2.2 Tinjauan Empiris

Mustikarini dan Fitriasaki (2012) melakukan penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini berusaha membantu manajer publik dalam menentukan apakah suatu strategi telah berhasil menggunakan langkah-langkah penilaian keuangan dan non-keuangan. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat digunakan untuk mendeskripsikan elemen-elemen pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan memanfaatkan ukuran *proxy*, penelitian ini berusaha menyelidiki bagaimana fitur pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda (*size*), *intergovernmental revenue* dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Andani dkk. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah diproksi dengan ukuran pemerintah daerah, kemakmuran daerah, belanja modal. Kinerja pemerintah provinsi menggunakan indikator skor untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal tidak
garuhi kinerja pemerintah provinsi.



Mattoasi dkk. (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai determinan sebesar 48,7%. Hasil penelitian ini memberi sumbangsi kepada pemerintah agar dapat menetapkan dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lebih efektif.

Ditasari dkk. (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel opini audit dan variabel temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan nilai t hitung sebesar -1,276 dan t tabel sebesar -1,655 sehingga nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Nilai signifikasinya sebesar $0,204 > 0,05$ dengan demikian H1 ditolak. Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan nilai t hitung sebesar -2,267 dan t tabel sebesar -1,655 sehingga nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Nilai signifikasinya sebesar $0,562 < 0,05$ dengan demikian H2 diterima.

Siregar dkk. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah temuan audit terhadap opini audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh jumlah temuan audit terhadap opini BPK pada kabupaten/kota di Sumatera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa



jumlah temuan atas pemeriksaan SPI dan jumlah temuan atas pemeriksaan kepatuhan secara parsial berpengaruh terhadap opini audit BPK.

Sari dkk. (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementrian/Lembaga. Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa adanya pengaruh tidak langsung temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kapasitas operator pengelola keuangan terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan. Temuan audit yang besar pada periode lalu akan mendorong K/L untuk menindaklanjuti temuan audit sehingga mengurangi temuan audit pada periode selanjutnya yang berdampak pada tingkat pengungkapan yang tinggi dan probabilitas perolehan opini audit WTP meningkat. Semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L yang tercermin dari tingkat pengungkapan yang tinggi sehingga peluang opini yang diperoleh K/L semakin baik sesuai Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.

Munawar dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit kepatuhan baik secara bersama-sama maupun parsil terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kab/kota di Aceh. Hasil penelitian yaitu jumlah temuan audit atas atas SPI berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD, diuji dengan melihat nilai koefisien regresi (β_1) untuk variabel



audit atas SPI (X_1). Koefisien regresi (β_1) variabel temuan audit atas SPI sebesar -0,487 yang berarti $\beta_1 \neq 0$. Hasil penelitian menolak hipotesis nol

(H01) dan tidak dapat menolak hipotesis alternatif (Ha1). Artinya temuan audit atas SPI berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD. Menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu jumlah temuan audit kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD. Hal ini diuji dengan melihat koefisien regresi (β_2) untuk variabel jumlah temuan audit kepatuhan. Koefisien regresi (β_2) variabel temuan audit kepatuhan diperoleh sebesar - 0,362 yang berarti $\beta_2 \neq 0$. Hasil penelitian ini menolak hipotesis nol (H02) dan tidak dapat menolak hipotesis alternatif (Ha2). Artinya temuan audit kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD.

Kurnia (2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh temuan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan struktur anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh temuan audit, opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan struktur anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi banten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh dengan arah negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; Struktur Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Sementara itu berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa seluruh variabel independen (bebas) mempengaruhi secara simultan variabel dependen (terikat) sebesar 14.4% variabel Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 85.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.



Lestari dan Rohman (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas pelayanan publik melalui kualitas laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh dari temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi terhadap kualitas pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dengan mengajukan data kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Aminah dkk. (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh *size*, *wealth*, *intergovernmental revenue* dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Size*, *Wealth*, *Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan menggunakan LPPD sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *size*, *wealth*, *intergovernmental revenue* dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Thanh dkk. (2019) melakukan penelitian mengenai dampak desentralisasi Fiskal terhadap Ukuran Pemerintah dan Komposisi Pengeluaran di Vietnam. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang dampak desentralisasi fiskal dan pemerintahan daerah terhadap ukuran pemerintah dan komposisi pengeluaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengestimasi model Durbin spasial, kami menemukan bahwa belanja publik lokal

an pemerintah tumbuh dari waktu ke waktu dan memiliki limpahan spasial. lisasi fiskal secara signifikan mengurangi pengeluaran publik dan ukuran



pemerintah, yang mendukung hipotesis Leviathan. Lebih menarik lagi, dengan menggabungkan tata kelola lokal, efek limpahan spasial marjinal dari desentralisasi fiskal terhadap belanja publik dan ukuran pemerintah menjadi lebih intensif. Temuan kami menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan fiskal untuk membatasi duplikasi belanja publik dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan daerah.

Wardhani dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara belanja publik, tata pemerintahan yang baik, dan hasilnya yang diukur dengan kinerja pemerintah daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja pemerintah dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dan apakah *good governance* dapat memperkuat pengaruh belanja pemerintah terhadap kinerja. Hasil Penelitian ini memberikan bukti empiris yang menarik bahwa pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia tidak efisien dalam meningkatkan kinerja. Sebaliknya, hasilnya menunjukkan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap kinerja. *Good public governance* berpengaruh positif terhadap kinerja dan mengurangi inefisiensi belanja pemerintah.

Syamsul dan Ritonga Taufiq (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: bukti empiris pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tata kelola pemerintah daerah berpengaruh secara positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dalam menunjukkan peran penting tata kelola pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.



Adriana (2017) melakukan penelitian tentang analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah se-jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki indeks transparansi terendah pada tahun 2015. Untuk tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki indeks transparansi terendah. Hasil pengkategorian menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam kategori *sufficient* pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Jawa termasuk dalam kategori *insufficient*. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa. Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, *press visibility* yang lebih tinggi, dan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

Hidayat dkk. (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kinerja Pendidikan Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Penelitian ini merupakan model kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Metode nilai selisih digunakan untuk menguji variabel moderasi. Pengujian regresi dilakukan sampel sekolah SD dan SMP dari populasi 167 di Kabupaten Bulungan



Propinsi Kalimantan Timur periode 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja pendidikan, semakin meningkatkan kinerja pendidikan. Variabel *good governance* juga mempengaruhi kinerja pendidikan secara independen baik secara simultan maupun parsial.

Insani (2016) melakukan penelitian tentang analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah di Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum. Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan *press visibility* yang lebih tinggi jika dibandingkan



pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangannya terendah.